



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi
e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com
WAKATOBI 93791

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/22
TGL. PEMBUATAN	:	1/10/2020
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	3/01/2022

Disahkan Oleh,
Ketua



Andi Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 19800126.200704.1.001

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Wangi-Wangi*



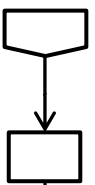
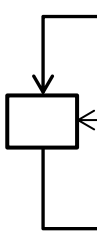
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku No.1, Kec. Wangi Wangi
Telp. (0404) 21871
WAKATOBI 93791

Nomor SOP	: SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2020
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 03 Januari 2022
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum						Kualifikasi pelaksana		
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 HIR Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), R.Bg. Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2); 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Instrumen Penaksiran Panjar Biaya Pemeriksaan setempat; 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara; 7 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan; 8 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 9 SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 10 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5; 11 Standar SAPM PA/MS 2018 3.22.1						1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;		
Keterkaitan						Peralatan/perlengkapan		
1. SOP Penetapan Majelis Hakim 2. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 3. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pemeriksaan Setempat						Peraturan-Peraturan, Instrumen dan Dokumen		
Peringatan						Pencatatan dan pendataan		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir						FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/09/01		

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan standar komponen biaya pemeriksaan setempat						Buku II	30 Menit	SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
2	Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan biayanya						Disposisi Surat	15 menit	Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan bukti penerimaan biayanya
3	Menetapkan Hakim Komisaris						Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
4	Penunjukan Panitera Pengganti						Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01)
5	Menetapkan Hari dan tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Setempat						Penetapan Majelis Hakim	5 menit	Jadwal Pelaksanan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang (FM/AP/09/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Desa terkait						Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa
7	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan						Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Berita acara sidang sidang pemeriksaan setempat
8	Mengirimkan hasil pemeriksaan setempat						Berita acara sidang sidang pemeriksaan setempat	1 jam	Surat pengantar (dilampiri dengan berita acara pemeriksaan setempat) dan bukti pengiriman